

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan kesejahteraan sosial

2.1.1. Definisi kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial menunjuk pada segenap aktivitas pengergonisasian dan pendistribusian pelayanan social bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh akifitas kesejahteraan sosial. Perlindungan social yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, semisal tunjangan bagi bagi orang cacat dan miskin, tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga. Dan beberapa skema yang dapat di kategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema penjaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial local, atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurut Suharto (2017) istilah kesejahteraan sosial sering di artikan sebagai kondisi sejahtera yaitu :

“Suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, Pendidikan dan perawatan kesehatan.”

Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. kesejahteraan sosial dapat juga di definisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analog, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau Pendidikan adalah wilayah dimana guru melaksanakan tugas tugas profesionalnya.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi (Suharto, 2017), yaitu :

‘*pertama*, kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. *Kedua*, institusi arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. *Ketiga*, aktifitas yakni suatu kegiatan kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.’

Dalam kutipan diatas dijelaskan bahwa ada beberapa makna mengenai kesejahteraan sosial yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan dan makna yang sama, ketiga konsepsi ini akan memberikan kesejahteraan apabila di gunakan dengan baik. Yang *pertama* adalah terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmaniah rohanah serta sisal dalam arti lain hal yang pertama ini dijelaskan masyarakat akan mengalami sejahtera apabila memiliki sandang pangan dan papan serta lingkungan sosial yang baik. Konsepsi yang *kedua* yaitu institusi ataupun pihak pemerintah yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan

tujuan agar masyarakatnya bisa mendapatkan sandang pangan dan papan tersebut hal tersebut bisa berlangsung dengan memberikan beberapa program kepada masyarakat agar dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan. *Ketiga* yaitu kegiatan kegiatan yang terorganisir dalam hal ini masyarakat harus diberikan beberapa kegiatan atau program yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.

2.1.2. Tujuan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial selain mempunyai tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kesejahteraan sosial juga harus mampu untuk menjadikan masyarakat sebagai faktor utama dalam pembangunan sosial di kehidupan dan lingkungan utama masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus mampu untuk menemukan kata sejahtera dalam peranan hidupnya karena pedoman ini sudah melakat dalam istilah tatanan masyarakat sosial.

Kesejahteraan sosial selain merupakan suatu ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan juga keberfungsian sosialnya, kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan umum. Dikutip dalam Fahrudin (2014:10) Tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.1.3. Fungsi - fungsi kesejahteraan sosial

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan – perubahan sosio – ekonomi, Adapun fungsi – fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (Support) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan

sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

2.1.4. Pembangunan kesejahteraan sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memeperkuat isntitusi institusi sosial (suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencangkup :

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaa kebebasan melalui perluasan aksebilitas dan pilihan pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2.2. Tinjauan tentang pelayanan sosial

2.2.1. Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui suatu pembentukan kebijakan sosial. Berbagai program dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial individu, keluarga, dan kelompok, merupakan komponen penting. Umumnya, layanan sosial adalah program-program yang mempekerjakan pekerja sosial atau profesional terkait yang diarahkan ke arah pencapaian tujuan kesejahteraan sosial. Definisi pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin (2014:51) adalah sebagai berikut:

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga yang terdiri atas program-program melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Hal di atas menyatakan bahwa pelayanan sosial dilakukan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan kesejahteraan. Pelayanan sosial juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kesulitan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan sosial memiliki pelayanan khusus kepada

personal, maka terdapat definisi pelayanan sosial menurut Romanyshyn yang dikutip Fahrudin (2014: 51) Pelayanan sosial adalah:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian individu-individu dan keluarga-keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang termasuk dalam kategori pelayanan yang merujuk pada individu dan keluarga agar kembali seperti biasanya dan memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai.

2.2.2. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau terpenuhinya kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2014:54) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.

3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu adanya pelayanan sosial yaitu dapat menjadi akses dalam memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan kutipan di atas hal ini sangat kongkrit dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang mana untuk menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir, dengan ini program tersebut mampu untuk memberikan jalan bagi masyarakat dalam memanfaatkan program pelayanan tersebut guna menjadikan individu, kelompok dan masyarakat menjadi berusaha untuk mengembangkan kapasitas kehidupannya menjadi lebih terarah dan sejahtera dalam tatanan kehidupannya.

2.3. Tinjauan pekerjaan sosial

2.3.1. Definisi pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi kemanusiaan yang berkiprah dalam arena atau bidang kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat. Di dalamnya juga dibahas juga tentang mengenai konsep keberfungsian sosial yang merupakan fokus perhatian

intervensi pekerjaan sosial serta perspektif kekuatan sebagai salah satu model pertolongan pekerjaan sosial.

Menurut (suharto,2005), ‘’pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, semisal psikologi, dokter, atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan juga mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada termasuk didalamnya orang penting lain yang mempengaruhi klien.’’

Dalam kutipan di atas menyatakan bahwa pekerja sosial berbeda dengan profesi profesi lain yang mana walaupun itu tetap target utamanya orang atau masyarakat. Pekerja sosial merupakan profesi yang tidak hanya dilihat dari satu arah saja dalam target utamanya pekerja sosial harus melihat berbagai aspek yang penting dalam lingkungan masyarakat atau sosialnya.

Menurut (zastrow, 1999) ‘’pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan dan memperbiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.’’

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan aktivitas atau tindakan profesional untuk membantu dan menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya agar bisa menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya, hal ini akan menyebabkan masyarakat menjadikan masyarakat mampu dalam mengatasi permasalahan sosial dalam lingkungannya.

2.3.2. Tujuan intervensi pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan bantuan kepada individu, kelompok maupun masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan juga membantu mengembalikan keberfungsian sosial yang lebih baik. Menurut The National Association Of Social Workers (NASW) dalam Huda (2009:15) awalnya pekerja sosial mempunyai 4 tujuan utama. Namun The Council On Social Work Education menambah 2 tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi 6, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak.
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional.

2.3.3. Fokus intervensi pekerjaan sosial

Berdasarkan dari definisi pekerjaan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang

memiliki tujuan untuk dapat mencegah dan mengatasi suatu permasalahan sosial. Pekerjaan sosial juga tidak hanya menangani permasalahan yang berkaitan dengan individu, namun juga menangani permasalahan sosial yang terjadi di ruang lingkup kelompok ataupun masyarakat. Menurut Suharto (2009:5) Fokus intervensi pekerjaan sosial adalah: “Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna.”

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan manusia yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Sehingga, mereka dapat meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial dapat dipandang dari berbagai segi yaitu:

1. Kemampuan Melaksanakan Peranan Sosial

Peran adalah perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang, pola perilaku ini ditentukan berdasarkan budaya dan status yang diduduki oleh seseorang.

2. Status Sosial

Status sosial bersifat jamal artinya orang hidup di masyarakat mempunyai status sosial lebih dari satu.

3. Interaksional

Setiap status sosial seseorang selalu mempunyai pasangan atau berinteraksi dengan pasangannya, interaksi ini sangat mempengaruhi

status sosial seseorang, apakah dia berstatus di atas atau berstatus di bawah.

4. Tuntutan dan Harapan

Setiap status sosial yang dimiliki menuntut tingkah laku yang sesuai dengan norma atau nilai dimana orang tersebut berada.

5. Tingkah Laku

Setiap orang dituntut dapat melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan status, peranan, tuntutan, dan harapan.

6. Situasional

Orang bertingkah laku sesuai dengan keadaan sangat penting untuk membentuk status sosial orang tersebut.

2.3.4. Metode intervensi pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial dalam praktiknya mempunyai tiga metode pokok dan metode bantu. Metode pokok adalah social case work, social group work, dan community organization/community development. Sedangkan metode bantunya adalah social work administration, social action, dan social work research. Menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2014:72) menyatakan:

Dalam praktik pekerjaan sosial, metode menunjukkan penggunaan secara teratur atas cara-cara, sumber-sumber, dan prosedur-prosedur, melalui pelaksanaan jenis peranan-peranan pertolongan seperti sebagai konselor, penasihat, pemungkin, konsultan, administrator, guru, pembimbing, model, berencana, peneliti, dan sebagainya.

Metode terdiri atas pelaksanaan peranan intervensi yang mengikuti prosedur dalam melaksanakan tugas-tugas seperti kontak awal, perumusan kontrak, assesment, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi. Bidang garap pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tentunya dalam hal ini seorang pekerja sosial harus dapat menempatkan dirinya karena dalam setiap penanganan yang diberikan baik kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

2.4. Tinjauan pembangunan kesejahteraan sosial

2.4.1. devinisi pembangunan kesejahteraan sosial

Penegertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Menurut (Suharto,1997) mengatakan bahwa :

“Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi institusi sosial.”

Devinisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat atau sosial merupakan usaha yang tersusun dan terencana yang mencangkup berbagai bentuk pendekatan atau kerjasama dari berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan manusia serta berusaha untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah sosial yang tentu berbeda di setiap wilayahnya dan memperkuat serta mengembangkan kembali

institusi yang sudah ada dalam membangun kesejahteraan sosial yang sesuai dengan harapan sebelumnya.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2.4.2. Fokus pembangunan kesejahteraan sosial

Banyak arti yang diberikan istilah pembangunan kesejahteraan sosial seperti yang dikatakan (Suharto,2005) menjelaskan bahwa :

“Pembangunan kesejahteraan sosial seringkali menyentuh, berkaitan atau bahkan, selintas, bertumpang tindih (*overlapping*) dengan bidang lain yang umumnya dikategorikan sebagai pembangunan sosial, semisal kesehatan ,pendidikan dan perumahan. Lebih dari itu, makna sosial tidak jarang di artikan

secara luas sebagai misalnya, kegiatan sukarelawan, hiburan, rekreasi, sesuatu yang bersifat non fisik atau non ekonomi”

Pembangunan kesejahteraan sosial saat ini seringkali bersamaan serta berkaitan bahkan sama seperti halnya dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti halnya kesehatan Pendidikan serta perumahan yang notabennya mempunyai tujuan yang sama ingin membangun kesejahteraan masyarakat, tidak aneh bahwa seseorang atau kelompok yang bergerak dalam bidang ini disebut sebagai seorang atau kelompok relawan kemanusiaan atau kegiatan kemanusiaan. Akan tetap dalam hal ini inti dari pembangunan kesejahteraan ini mempunyai tujuan yang sama akan tetapi pekerja sosial justru akan lebih paham dengan kondisi dan situasi yang ada di bandingkan dengan seorang atau kelompok relawan biasa.

2.4.3. Visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial

Tentang visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial yang diusulkan oleh Suharto pada 2010 pada bukunya (Suharto,2017) masuk ke dalam rencana strategis deptsos kedepan yaitu :

Visi : Meningkatnya kualitas hidup, kepedulian dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia pada tahun 2010.

Misi : *pertama*, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memiliki kemampuan menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. *Kedua* , memperkuat kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sejalan dengan

prinsip masyarakat peduli (*caring society*) dan kesetiakawanan sosial. *Ketiga*, memantapkan dan mengembangkan keberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat melalui sistem perlindungan sosial yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial.

2.5. Tinjauan tentang pemberdayaan

2.5.1. Devinisi tentang pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang barang serta jasa yang mereka perlukan. Menurut Ite (1995:61-64) dalam buku edi Suharto 2017 :

“Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini di artikan sebagai pemerintah bukan hanya itu kekuasaan juga menyangkut politik dalam arti sempit atau penguasaan klien atas.”

Devinisi di atas mengartikan bahwa pemberdayaan mempunyai dua kunci utama yaitu yang pertama adalah kelompok lemah dalam hal ini kelompok lemah tersebut yaitu para nelayan kecil yang menjadi sasaran utama program ini. Kelompok kecil yang di maksud sebenarnya mempunyai arti yang luas yaitu masyarakat yang hendak di berdayakan.

Yang kedua yaitu kekuasaan dalam hal ini kekuasaan yang dimaksud yaitu pemerintahan yang mempunyai kewajiban dalam ini untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks ini yaitu pemerintah yang seharusnya memberikan fasilitas terhadap nelayan nelayan kecil yang semestinya dan layak untuk di berdayakan.

2.5.2. Indikator pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan bahwa seseorang itu berdaya atau tidak. Ketika sehingga sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat di konsentrasikan pada aspek aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu di optimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Dalam buku suharo (2004) Schuler, hashemi, dan riley mengembangkan 8 indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index pemberdayaan. Diantaranya :

1. Kebebasan mobilitas, dalam hal ini tingkat mobilitas akan tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil.
3. Kemampuan membeli komoditas besar

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan keputusan rumah tangga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik
7. Keterlibatan kampanye dan protes protes
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

2.5.3. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar .

Memberdayakan masyarakat memerlukan proses yang sangat Panjang, agar mereka menjadi berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri, menurut (alfitri, 2011) ,mengatakan bahwa :

“secara konseptual, pemberdayaan harus mencangkup enam hal berikut *pertama*, learning by doing *kedua*, problem selving *ketiga* self evalution, *keempat*, self development and coordination *kelima*, self selection *keenam*,self decisim”

Yang pertama yaitu learning by doing yang artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus

menerus dampaknya dapat terlihat. Yang kedua yaitu problem selving yang artinya pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara waktu yang tepat. Yang ketiga self evaluation artinya yaitu pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Yang ke empat yaitu self development and coordination artinya mendorong agar mampu melakukan penegmbangan diri yang kelima yaitu self selection yaitu suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah. Yang terahir yaitu self decism yaitu dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memeiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

2.6. Tinjauan pengembangan masyarakat

2.6.1. devinisi pengembangan masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pebdayagunaan sumber sumber yang adapada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Menurut (Suharto,2002) :

“Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk mencegah anak anak terlantar atau diperlakukan salah (*abused*) sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat meliputi beberapa pelayanan sosial yang berbasis masyarakat yang pertama yaitu mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan tidak sesuai dengan anak-anak yang sesuai dengan aturan pemerintahan yang sesuai aturan negara dalam hal ini anak-anak terlantar yang di biarkan tanpa ada pertanggung jawaban dari orang tua khususnya, yang kedua yaitu keluarga yang berpendapatan rendah agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya.

2.6.2. Konsep dan cakupan

Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan niat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan Bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2.6.3. Model model pengembangan masyarakat

Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya nanti ketiga komponen saling bersentuh satu sama lainnya, setiap komponen dapat digunakan kombinasi dan simultan sesuai kebutuhan dan situasi yang ada. dalam buku (Suharto, 2017) :

Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal. *Three models of community organization practice* (1968), mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat

pertama pengembangan masyarakat local. *Kedua* perencanaan sosial. *Aksi sosial*.

2.6.4. Pengembangan masyarakat lokal

Menurut (Suharto,2017) mengatakan bahwa :

“Pengembangan masyarakat adalah proses yang di tujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri “

Dalam devinisi diatas dijelaskan bahwa anggota masyarakat di pandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya yang menjadikan kendala adalah potensi masyarakat tersebutlah yang belum bisa dikembangkan.

Pengembangan masyarakat local pada dasarnya merupakan interaksi antara anggota masyarakat setempat yang di fasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada tujuan proses dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi, kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi,

relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa rendah ini.

2.7. Tinjauan sumberdaya dan pemanfaatan

2.7.1. Devinisi sumberdaya dan pemanfaatan

Zona ekonomi eksklusif Indonesia yang membentang luas dengan keaneka ragaman sumberdaya ikannya harus dijaga harus dilestarikan karena merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, menurut (Kurnia Ida, 2017) mengatakan bahwa :

“sumberdaya kelautan merupakan sumberdaya alam yang dapat diterima sebagai sumberdaya andalan yang harus dimanfaatkan untuk mendukung kelanjutan pembangunan ekonomi Indonesia”

Devinisi di atas menjelaskan bahwa sumberdaya kelautan merupakan sumberdaya yang secara alamiah tumbuh dengan sendirinya yang di berikan oleh tuhan untuk kebutuhan manusia yang sebagaimana penghuni bumi nusantara ini. Oleh karenanya mau tidak mau manusia selaku penghuni bumi harus menerima keadaan sumberdaya tersebut. Pada dasarnya sumberdaya akan jauh lebih manfaat apabila sumberdaya tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri untuk kebutuhan hidupnya, dalam hal ini juga sumberdaya kelautan sangat bermanfaat dalam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang selalu mengharapkan kehidupannya serta penghasilannya di laut.

Dalam hal ini sumberdaya kelautan akan terus ada selama kehidupan berlangsung, tergantung manusianya itu saja yang harus menjaga kelestarian laut tersebut. Laut tidak perlu di tanam atau dibikin benih seperti halnya pertanian yang sebelumnya harus melalui masa penanaman terlebih dahulu, akan tetapi laut tidak demikian, laut bisa dimanfaatkan oleh siapa saja asalkan melalui s.o.p yang sudah ada dalam aturan aturan yang sudah ada. Bahkan laut langsung bisa di panen kapanpun selagi cuaca bisa mendukung dalam penangkapannya.

2.7.2. Perkembangan pengaturan pemanfaatan ZEE Indonesia

Indonesia pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 14 november 2008, telah mempunyai peraturan perundang undangan nasional yang mengatur wilayah negara wilayah kesatuan republik indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara menurut undang undang tentang wilayah negara, UU No. 43 tahun 2008 yang berbunyi “salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”

Bagi bangsa indonesia, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan melaksanakan peraturan yang ada terkait dengan pemanfaatan surplus yang tersedia, termasuk menyiapkan seperangkat

pengaturan untuk mewujudkan pemanfaatan optimum sesuai dengan daya dukung yang tersedia, serta menetapkan batas-batas ZEE Indonesia dengan negara-negara tetangga di tempat perbatasan maritime yang saling tumpang tindih.

2.7.3. Perkembangan pengaturan kelautan

Tindak lanjut Indonesia yang merupakan langkah kongkrit konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia, menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan wujud dari pengimplementasian dari kondisi yang terjadi saat itu, dan sekaligus sebagai antisipasi dari adanya pengaturan dalam hukum internasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak yang lain dan kewajiban-kewajiban dalam tercapainya kepastian hukum.

Sebelumnya sudah dijelaskan tentang ZEE Indonesia dalam buku (Kurnia Ida, 2017) UU tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Tahun 1983 yaitu : “jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya

dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial indonesia.”

2.8. Potensi sumber daya perikanan

Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa lautan memiliki potensi yang besar pada bidang perikanan. Selain di laut, pembudidayaan ikan dapat pula dilakukan dikolam maupun disawah. Menurut (nasrullah jamaludin adon, 2015) berdasarkan jenis perairannya, perikanan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Perikanan air tawar. Usaha perikanan air tawar telah lama dilakukan oleh penduduk indonesia. Usaha ini dapat dilakukan di kolam, danau, sawah, dan sungai. Jenis ikan yang sesuai untuk perikanan air tawar adalah ikan mas, mujair, nila, lele, dan gurame.
2. Perikanan air laut. Dibandingkn danau dan sungai, laut merupakan sumber atau pabrik ikan alami yang paling besar dipermukaan bumi. Dilaut terdapat berbagai jenis ikan yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam potensial yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dalam pemanfaatannya, perlu di perhatikan kaidah kaidah pelestarian alam agar tidak mengancam kehidupan laut. Wilayah perairan laut nusantara sampai pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perkirakan sampai 3 juta km². Apabila wilayah laut dapat dimanfaatkan secara optimal, usaha perikanan laut dapat dapat menjadi salah satu sumber devisa negara yang sangat potensial. Beberapa jenis

ikan yang dapat di jumpai di wilayah perairan lautan nusantara adalah ikan tuna, cucut, cakalang, pari, etong, ubur ubur, dan kakap.

3. Perikanan air payau. Selain perikanan laut dan darat, usaha pembudidayaan ikan dapat dilakukan juga di air payau atau rawa. Jenis ikan yang dapat di budidayakan di air payau adalah ikan bandeng dan udang. Perikanan air payau juga disebut dengan perikanan tambak. Usaha perikanan tambak hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai. Meskipun demikian, tidak semua pantai dapat dijadikan sebagai areal tambak.